



INOVASI E-GOVERNMENT PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG: STUDI PADA WEBSITE INFOLOKER

Oktia Dita Suciati, Mochamad Faizal Rizki, Rachmat Ramdani

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa

Abstrak

Angkatan kerja di Kabupaten Karawang kesulitan memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang berakibat pada tingginya tingkat pengangguran terbuka sehingga menginisiasi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang untuk mengadakan suatu inovasi berupa website infoloker. Hadirnya website infoloker dapat digunakan para pencari kerja untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan dan mempermudah proses melamar pekerjaan dengan lebih cepat waktu dan biaya yang murah dibandingkan menggunakan cara konvensional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun Teknik Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Untuk menganalisis fenomena ketenagakerjaan peneliti menggunakan teori penerapan electronic government menurut Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2006:14) yang terdiri dari beberapa elemen yaitu: Support, Capacity dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi E-Government website infoloker pada elemen Support dasar legalitas, keamanan website dan sosialisasi belum terselenggara dengan optimal. Pada elemen kedua yaitu Capacity ketersediaan anggaran, infrastruktur dan SDM yang berkompeten telah memadai. Terakhir pada elemen Value sudah dapat menggambarkan ketersediaan manfaat baik bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik maupun bagi masyarakat sebagai pengguna dari inovasi E-Government tersebut.

Kata Kunci: E-Government, website infoloker, pelayanan publik, tenaga kerja.

PENDAHULUAN

Dewasa ini tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan profesional semakin meningkat. Bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi publik yakni menyediakan layanan publik berkualitas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya pemerintah dalam pemberian layanan publik bahkan menjadi representasi dari pelaksanaan *clean and good governance* pada suatu negara. Pada era globalisasi, dengan adanya teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Berdasarkan yang tertera dalam Inpres, *E-Government* dimaksudkan untuk menjamin keselarasan manajemen dokumen dan sistem pemrosesan informasi elektronik dalam mengembangkan keterbukaan sistem pelayanan. Pengembangan *E-Government* memberdayakan Kepala Daerah untuk mengambil tindakan yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan *e-government* secara nasional sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik merupakan langkah praktis pemerintah dalam upaya pengembangan *E-Government*. Tujuan Perpres tersebut adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan elektronik yang memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan, pengaturan, pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan SPBE secara terpadu. (Riris Katharina, 2020:31).

Dengan adanya peningkatan *E-Government*, sistem manajemen dan prosedur operasional dapat dikembangkan melalui pengoptimalan manfaat teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi

meliputi dua kegiatan utama, yaitu: 1) penanganan data, manajemen informasi, sistem pengelolaan dan prosedur operasional secara elektronik dan 2) pemanfaatan perkembangan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh warga di seluruh negeri. Kegiatan kedua tersebut dapat dilakukan dengan memberikan informasi melalui website.

Penggunaan situs web oleh organisasi publik memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dengan menyediakan informasi yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dan organisasi tentang proses, struktur dan produk pemerintah, dengan menyediakan saluran untuk saling berinteraksi. (Charoline, 2018:1088).

Pemerintah Kabupaten Karawang mengembangkan berbagai aplikasi dan portal website dalam upaya mempermudah penyelenggaraan pemerintah digital. Salah satu sistem informasi lowongan pekerjaan (loker) online berbasis website dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dalam upaya menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Karawang, serta mempermudah masyarakat Kabupaten Karawang dalam memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan melalui website infoloker.karawangkab.go.id.

Sejak dirilis pada tahun 2020 jumlah Pencari kerja yang menggunakan website infoloker.karawangkab.go.id mencapai 115.966 orang, dengan jumlah perusahaan yang bekerjasama mencapai 250 perusahaan dari 1.400 perusahaan yang tersebar di sejumlah kawasan industri di Kabupaten Karawang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan pengguna website infoloker tidak menyentuh angka 10 persen dari total perusahaan yang ada di Kabupaten

Karawang (infoloker.karawangkab.go.id, 2022).

Sejauh ini dasar hukum website infoloker masih merupakan Surat Edaran Bupati Karawang Nomor 560/5052/Disnakertrans tentang Informasi Lowongan Kerja Berbasis Online yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2020. Hal tersebut mengindikasikan belum adanya payung hukum yang mengatur dasar legalitas keharusan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karawang agar dapat menggunakan website infoloker dalam proses rekrutmen karyawan, serta belum terdapat dasar hukum mengenai keamanan data dan informasi para pencari kerja yang termuat dalam website infoloker.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell (2013:4) penelitian kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami makna dari berbagai individu atau kelompok orang yang timbul dari masalah sosial atau kemanusiaan, dimana proses penelitian melibatkan upaya besar seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif tema khusus ke umum dan menafsirkan makna data.

Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling dalam menentukan informan. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data yang mempertimbangkan berbagai hal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data Primer dan Sekunder. Dimana data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa jurnal, peraturan perundangan-undangan, maupun artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

Sedangkan analisis data pada penelitian ini melewati tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menggunakan teori elemen sukses penerapan *E-Government* menurut hasil riset Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2006:14), dimana dalam menganalisis inovasi *E-Government* dalam website infoloker pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang berdasarkan kepada 3 elemen sukses yakni *Support*, *Capacity* dan *Value*.

1. Support (dukungan)

Elemen support merupakan unsur terpenting yang harus dimiliki oleh pemerintah sebab perlu adanya kemauan dan komitmen dalam menerapkan konsep *E-Government*. Pada elemen ini lebih menitikberatkan pada dukungan dari seorang pemimpin (*political will*) dalam mengimplementasikan konsep *E-Government*.

Dengan mulai dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik merupakan langkah awal Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan penerapan sistem teknologi dan informasi dalam mengembangkan keterbukaan pada pelayanan publik.

Berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Karawang memproyeksikan peningkatan dan optimalisasi penerapan *E-Government* kedalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang dalam upaya mengembangkan konsep *good governance* dan *clean governance* yang

bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik. Kemudian berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada pasal 4 disebutkan adanya tujuan kehadiran SPBE yakni untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik dan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. Kemudian berdasarkan pada pasal 27 ayat 1 terkait layanan SPBE, website infoloker termasuk kedalam kategori layanan publik.

Kemampuan meluncurkan website infoloker di Kabupaten Karawang tidak terlepas dari adanya sinergitas organisasi antar perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, dan berdasarkan pula kepada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang adalah satuan kerja perangkat daerah yang mengemban tanggung jawab mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi teknologi informasi di daerah.

Pada sumber daya manusia dalam website infoloker sudah terselenggarakan dengan menghadirkan satu bidang khusus yang menangani website infoloker yakni pada Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja dengan mengalokasikan 6 pegawai sebagai operator website infoloker yang ditempatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dan juga di Mall Pelayanan Publik yang berada di Mall Technomart.

Selanjutnya sumber daya finansial dalam inovasi *E-Government* dalam pelayanan publik dialokasikan dengan anggaran yang dibebankan kepada Diskominfo Kabupaten Karawang, dimana alokasi anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang. Meskipun tidak terdapat bagian khusus yang menangani website infoloker pada Diskominfo Kabupaten Karawang, namun pihak Diskominfo Kabupaten Karawang mengalokasikan sejumlah sumber daya manusia pada bagian Penyelenggaraan *E-Government* yang menangani seluruh aplikasi layanan pemerintah di Kabupaten Karawang dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada Perjanjian Kinerja Diskominfo Kabupaten Karawang Tahun 2020 yakni sebesar Rp. 3.069.800.000.

Pada suprastruktur *E-Government* dalam hal ini dapat dengan adanya dihidirkannya undang-undang dan peraturan pemerintah yang jelas serta ditugaskannya lembaga-lembaga khusus sebagai penanggung jawab utama. Dalam penerapan website infoloker belum memiliki dasar hukum yang mengatur agar setiap perusahaan yang terdapat di Kabupaten Karawang untuk wajib bergabung dan menggunakan fasilitas website infoloker tersebut dan peraturan yang mengatur mengenai keamanan data para pengguna website infoloker. Landasan hukum yang mengatur mengenai inovasi website infoloker sementara ini hanya terdapat Surat Edaran Bupati Karawang Nomor 560/5052 Disnakertrans Tentang Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Online yang masih bersifat menghimbau.

Berkaitan dengan infrastruktur teknologi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang membuat beberapa program kerja pada Bidang *E-Government* dalam Rencana strategis dan Perjanjian kinerja tahun 2020. Dalam menghadirkan infrastuktur

pedukung pelaksanaan website infoloker bidang tersebut menyusun program peningkatan sarana dan prasana teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur teknologi tersebut yang berupa wujud *hardware* dan *software* dalam mendukung penerapan website infoloker telah tersedia dengan cukup memadai.

Penerapan *E-Government* di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang pun tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pencari kerja dan perusahaan sebagai yang membuka lowongan pekerjaan. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Karawang dilaksanakan dengan mendatangi berbagai perusahaan, desa maupun sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Karawang. Namun sosialisasi tersebut terkendala dengan adanya pandemi covid-19 sehingga mobilitas Disnakerpun terbatas. Terlebih sepanjang tahun 2020 hingga 2021, Indonesia menerapkan hadirnya *lockdown* (karantina wilayah) termasuk di Kabupaten Karawang.

2. Capacity (Kemampuan)

Elemen sukseki kedua yang harus dimiliki dalam menyelenggarakan *E-Government* secara optimal adalah *capacity* (kemampuan) dari pemerintah Kabupaten Karawang untuk dapat mendukung penerapan inovasi website infoloker agar dapat terlaksana. Dalam elemen *capacity* ini peneliti meninjau terdapat tiga hal akan menjadi tolak ukur kemampuan yang dimiliki yaitu Ketersediaan sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten.

Ketersediaan sumber daya terutama berkaitan dengan sumber daya finansial sangat penting untuk mendukung pelaksanaan penerapan berbagai inovasi *E-Government* di

pemerintahan. Sumber daya finansial untuk website infoloker berasal dari APBD Diskominfo Kabupaten Karawang sebagai pengembang aplikasi pelayanan publik di Kabupaten Karawang dengan besaran anggaran Rp. 17.302.718.000 yang kemudian anggaran tersebut didisposisikan pada masing-masing bidang kerja di Diskominfo.

Infrastruktur IT merupakan alat dari pelaksanaan *E-Government*, tanpa adanya infrastruktur yang mendukung maka tidak akan berjalan dengan optimal pemerintahan berbasis elektronik ini. Website Infoloker merupakan sebuah inovasi *E-Government* terdapat beberapa usaha perbaikan pada infrastruktur teknologi informasi website infoloker sesuai dengan permasalahan dan kendala terkait dengan server dan jaringan terus diadakan perbaikan seperti adanya bantuan jaringan dari provinsi Jawa Barat.

Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian pada bidang teknologi informasi dan komunikasi diperlukan agar penerapan konsep *E-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat dan prinsip yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan bidang Penempatan Dan Perluasan Kerja Disnaker Kabupaten Karawang didapatkan pernyataan bahwa Disnaker Kabupaten Karawang sebagai pengguna dan operator website infoloker memiliki latar pendidikan yang belum sesuai dengan kebutuhan pada bidang TIK sebab operator website infoloker merupakan lulusan sekolah menengah atas dan tidak memiliki kualifikasi pada bidang TIK.

Selanjutnya pada sisi pengembang website termasuk operator teknis yang berkaitan dengan teknologi yakni Diskominfo Kabupaten Karawang sudah mumpuni dalam hal kualitas. Sebanyak 74 apartaur yang terdiri dari 31 PNS dan 43 Pegawai Kontrak merupakan lulusan pada bidang

teknologi informasi, namun dalam kuantitas masih belum mumpuni, sebab jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban tugas yang diberikan. Sebab pada bidang penyelenggaraan *E-Government* tidak hanya menangani website infoloker namun seluruh aplikasi pemerintah yang tersebar di Kabupaten Karawang.

3. Value (Manfaat)

Elemen kunci sukses penerapan *E-Government* yang ketiga adalah *value* (manfaat) dari hadirnya sebuah inovasi aplikasi tersebut. Unsur *value* tidak akan diperoleh meskipun banyaknya inisiatif kebijakan dan program apabila tidak ada pihak yang merasa diuntungkan. Dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-Government* bukanlah kalangan pemerintah itu sendiri melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*).

Pada dimensi *Supply side* (Pemerintah) sebagai penyelenggara pelayanan berbasis elektronik sudah cukup baik dan kehadiran website infoloker sesuai dengan tujuan dan harapan dari pihak Disnakertrans Kabupaten Karawang. Hadirnya website infoloker memberikan berbagai manfaat bagi Disnakertrans Kabupaten Karawang, yakni adanya sinergitas dan peningkatan koordinasi antar berbagai stakeholder terkait baik itu pemerintah yakin dengan Diskominfo maupun dengan pihak swasta. Kemudian hadirnya website infoloker memberikan kemudahan bagi para operator untuk melakukan verifikasi berkas pelamar menjadi lebih efektif dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya pemberian layanan publik di kantor Disnakertrans pun dapat dilaksanakan lebih cepat waktu dan murah biaya dibandingkan dengan metode konvensional, terutama pada masa pandemi covid-19 dimana mobilitas terbatas. Namun masih terdapat

kontradiksi dari hadirnya website infoloker sebagai layanan publik berbasis elektronik dimana dalam pembuatan Kartu Kuning sebagai salah satu persyaratan melamar pekerjaan masih dilakukan secara konvensional.

Pada elemen *value* (manfaat) berkaitan dengan *Demand Side* (Masyarakat) masih belum mumpuni dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat selaku objek dari hadirnya website infoloker pun masih belum dapat dirasakan secara maksimal. Meskipun terdapat kemudahan dalam pendaftaran serta menggunakan website infoloker yang diperuntukan khusus bagi masyarakat pencari kerja yang memiliki KTP Karawang di Kabupaten Karawang, namun masih banyak keluhan dari masyarakat akan sulitnya mendapatkan panggilan kerja meskipun telah berulang kali melakukan proses melamar pekerjaan melalui website infoloker.

SIMPULAN

Berdasarkan kepada hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai inovasi *E-Government* dalam pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang: Studi pada website infoloker sebagai berikut:

Pada website infoloker telah disepakati kerangka *E-Government* agar dapat terlaksananya pelayanan berbasis aplikasi telah dilaksanakan dengan baik hal tersebut didukung dengan hadirnya Peraturan Daerah Karawang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan dihidirkannya website infoloker yakni mempermudah penyebaran informasi lowongan kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia. Pada sumber daya finansial yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang dialokasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang sebagai pencipta dan pengembang aplikasi layanan publik untuk mengadakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi baik dalam bentuk *hardware* maupun *software*.

Sementara itu alokasi sumber daya manusia dihadirkan pada Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang sebagai operator website infoloker. Namun masih terdapat kekurangan pada website infoloker dengan belum diadakannya suprastruktur pendukung seperti peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar legalitas dan keamanan data para pengguna website infoloker. Dalam hal sosialisasi konsep *E-Government* secara berkelanjutan pun masih belum efektif dilaksanakan, hal tersebut terlihat dari jumlah pengguna website infoloker yang hanya berjumlah 115.966 pengguna per Agustus 2022, dan perusahaan yang bergabung hanya 250 perusahaan dari 1400 perusahaan yang berada di Kabupaten Karawang.

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengalokasikan berbagai elemen *E-Government* telah terlihat dari ketersediaan sumber daya finansial pada Bidang Penyelenggaraan *E-Government* Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan besaran anggaran mencapai Rp. 3.069.880 relevan dengan adanya peningkatan serapan anggaran APBD dan Kebutuhan Belanja Diskominfo Kabupaten Karawang tahun 2020. Unsur lain terkait dengan infrastruktur teknologi pun telah sudah mumpuni, hal ini ditinjau dari dialokasikannya berbagai peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi pada sumber daya manusia yang kompeten masih ditemukannya

kekurangan dalam hal kualitas operator website infoloker yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kendati demikian pihak Disnakertrans Kabupaten Karawang turut menghadirkan perbaikan kualitas pegawai dengan mengadakan pelatihan operasional terkait website infoloker.

Manfaat yang dirasakan akan kehadiran website infoloker jika dilihat dari sisi *supply side* atau pemerintah yang menyediakan jasa layanan publik sudah dapat dirasakan dengan baik. Adanya transformasi layanan publik pada proses pencari kerja yang bersifat konvensional menjadi digital dengan hadirnya website infoloker mengurangi beban kerja Disnakertrans Kabupaten Karawang terutama dalam hal verifikasi dan proses sortir berkas dan persyaratan pelamar kerja menjadi lebih cepat dan mudah. Namun manfaat dari konsep *E-Government* tidak hanya dilihat dari unsur penyelenggara layanan, manfaat tersebut pun harus dapat dirasakan oleh pengguna atau objek dari hadirnya inovasi *E-Government* tersebut dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna (*demand side*). Masih adanya keluhan terkait kendala dalam mengakses website infoloker dan kendala teknis lain perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam peningkatan teknologi yang digunakan. Kemudian, Masih adanya keluhan sulitnya mendapatkan pekerjaan dari masyarakat pengguna website infoloker dikarenakan jumlah perusahaan yang bergabung hanya mencapai 10% dari jumlah keseluruhan perusahaan yang berada di Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik*

Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET

Katharina, Riris. 2020. *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Ramadana, Muhammad Fitri, dkk. (2020) *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Santoso, Gempur. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Cruz, David Valle, et al. 2021. *From E-Budgeting to smart budgeting: Exploring the potential of artificial intelligence in government decision-making for resource allocation*. Government Information Quarterly. 1. DOI:

Mensah, Isaac Kofi (2020) *Impact of Government Capacity and E-Government Performance on the Adoption of E-Government Services*. International Journal of Public Administration, 43(4), 301.

Prihanto, I. G. (2017). *E-Government dan Penerapannya*. Berita Dirgantara, 18(1), hal 2.

Putra, B. C., & ISBANDONO, P. (2019). *Inovasi Pelayanan Lowongan Pekerjaan Melalui Program Ayo Kerja Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Penduduk Provinsi Jawa Timur*. Publika, 7(5).

Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). *Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia: Analisis Website*. In Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hal 331.

Yusron, A., Ramdani, R & Sugiarti, C. (2022). *Digital Governance dalam Pelaksanaan Program E-Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang*. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 7(1).